

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk besar dan wilayah sangat luas, ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik Indonesia. Menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional, wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi dunia yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial yang ditandai: 1) Harga pangan internasional mengalami lonjakan drastis, 2) Meningkatnya kebutuhan pangan untuk energi alternatif, 3) Resesi ekonomi global yang berakibat semakin menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan; 4) Serbuan pangan asing (westernisasi diet) berpotensi besar penyebab gizi lebih dan 5) Meningkatnya ketergantungan pada impor (Mewa,2010).

Menurut Wulan dalam Hamid (2013) Konsumsi pangan rumah tangga merupakan kebutuhan anggota rumah tangga terhadap pangan yang bertujuan untuk menegaskan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Konsumsi pangan terdiri dari sembilan kelompok pangan utama yang perlu untuk dikonsumsi oleh rumah tangga antara lain kelompok padipadian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur buah dan kelompok lainnya. Sebagai acuan dalam pembangunan pangan dan gizi tingkat nasional digunakan standard angka kecukupan gizi yang meliputi angka kecukupan energi (AKE) di tingkat konsumsi sebesar 2150 kkal/kap/hari dan angka kecukupan protein (AKP) di tingkat konsumsi sebesar 57 gram/kap/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2018)

Menurut Arida (2015) bahwa secara umum pengeluaran rumah tangga berupa kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan, dimana kebutuhan

keduanya berbeda. Pada kondisi pendapatan yang terbatas, terlebih dahulu dipentingkan kebutuhan konsumsi pangan. Sehingga dapat dilihat pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun demikian seiring dengan pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pola konsumsi untuk pangan akan menurun dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan non pangan. Seiring dengan kondisi tersebut akan terukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada rumah tangga miskin, pengeluaran pangan akan lebih besar dari pada pengeluaran non pangan sehingga hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan gizi dalam penentuan ketahanan pangan rumah tangga. Pemenuhan gizi yang diperoleh dari pangan yang dikonsumsi akan menentukan tingkat konsumsi. Semakin tinggi nilai gizi pangan berupa energi yang dikonsumsi, maka tingkat konsumsi energi juga akan meningkat. Pemahaman terhadap perubahan pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga berguna untuk memahami kondisi kesejahteraan rumah tangga, tingkat dan jenis jenis pangan yang dikonsumsi serta perubahan yang terjadi. Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia pada umumnya terdiri dari : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, lemak (minyak), buah/biji, sayur-sayuran, gula, kacang-kacangan, dan lain-lain.

Saat ini, skor PPH telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja di bidang ketahanan pangan yang tercantum dalam RPJMN 2009 - 2014 dan RPJMN 2015 - 2019. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan .

Pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi yang dijamin dalam Undang-Undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian ungkapan pembuka dalam UU Pangan No. 18 tahun 2012. Dalam UU tersebut, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sementara itu, ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan terutama pangan pokok melalui berbagai program. Penyediaan pangan dari produksi dalam kurun 2010-2014 menunjukkan peningkatan seperti untuk padi sebesar 1,63% per tahun. (Badan Ketahanan Pangan, 2015).

Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat adalah distribusi pendapatan masyarakat diantara golongan pendapatan penduduk (Yustika, 2002).

Struktur pengeluaran juga merupakan indikator kesejahteraan yang sama pentingnya dengan indikator lainnya pada rumah tangga. Tingkat pemerataan pengeluaran rumah tangga dapat dilihat dari distribusi antar komponen pengeluaran yang dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk pangan dan non-pangan. Dalam kondisi yang berimbang, total pendapatan seharusnya merupakan total dari pengeluaran dan tabungan. Dengan kata lain bila total

pengeluaran rumah tangga lebih rendah dari total pendapatan, maka ini mencerminkan bahwa rumah tangga tersebut memiliki tabungan (Suhaeti, 2005).

Kesejahteraan memiliki keterkaitan terhadap pola konsumsi, hal ini disebabkan apabila terjadi peningkatan dan penurunan tingkat kesejahteraan akan berpengaruh terhadap pola konsumsi rumah tangga. Peningkatan kesejahteraan sangat mendorong bagi terbentuknya kualitas prima kerja karyawan, oleh karena kesejahteraan karyawan menjadi perhatian bagi perusahaan agar terbentuk kualitas prima kerja bagi karyawan. Karyawan adalah pelaku semua aktivitas didalam sebuah perusahaan, sehingga peningkatan kesejahteraan oleh perusahaan bagi karyawannya akan mampu meningkatkan kinerja prima disamping meningkatkan rasa kebanggaan dalam diri karyawan tersebut. Kinerja ini dapat diraih dengan cara :

- a. Pembinaan rohani, pola hidup sehat untuk karyawan dan keluarga.
- b. Pembinaan lingkungan sosial yang sejahtera dan harmonis.
- c. Penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas untuk anak karyawan.
- d. Tersedia kesempatan pengembangan diri karyawan.
- e. Gaji dan jaminan hari tua yang layak.

PT. Adei Plantation & Industry merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit sejak tahun 2014 dengan banyak karyawan pada berbagai jenis pekerjaan. Jumlah karyawan meningkat pada tahun 2017 dengan total 1900 karyawan. Konsumsi pangan yang baik dan teratur merupakan salah satu hal yang berpengaruh kepada karyawan PT ADEI Plantation & Industry, oleh karena itu diperlukan pola konsumsi pangan pada karyawan di berbagai golongan. Pola konsumsi pangan dipengaruhi oleh pendapatan dalam mengeluarkan biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di PT. ADEI Plantation & Industry.

Pendapatan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. ADEI Plantation & Industry Kebun Mandau berbeda untuk setiap karyawan. Hal ini dikarenakan

adanya perbedaan golongan setiap karyawan dan kapasitas kerja (premi kerja). Perbedaan golongan yang membedakan karyawan tersebut merupakan karyawan pimpinan atau karyawan pelaksana disamping itu perbedaan golongan ini juga membedakan kapasitas kerja dan tanggung jawab setiap karyawan. Perbedaan pendapatan karyawan di perkebunan menyebabkan perbedaan tingkat konsumsinya. Perbedaan pendapatan juga mencerminkan adanya ketidakmerataan pendapatan. Perbedaan pendapatan tersebut mengakibatkan jumlah bahan yang dikonsumsi dan pengeluaran konsumsi pangan suatu rumah tangga pada karyawan, serta berbeda pula persentase penggunaan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi pangan. Perbedaan inilah yang menyebabkan jumlah bahan pangan yang konsumsi akibat perubahan pendapatan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian tentang konsumsi pangan karyawan perkebunan kelapa sawit di PT. Adei Plantation & Industry Kebun Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

B. Perumusan masalah

Karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana memiliki perbedaan pendapatan sesuai dengan jenis pekerjaan serta tanggung jawab, perbedaan pendapatan berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana terhadap jenis konsumsi dan pengeluaran konsumsi. Oleh karena itu maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pola konsumsi pangan keluarga karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana di PT. Adei Plantation & Industry Kebun Mandau?
- 2) Bagaimana perbedaan pola konsumsi pangan antara keluarga karyawan pimpinan dan keluarga karyawan pelaksana di PT. Adei Plantation & Industry Kebun Mandau?
- 3) Berapa persentase pengeluaran konsumsi pangan keluarga karyawan pimpinan dan keluarga karyawan pelaksana dari total pendapatan rumah tangga keluarga karyawan pimpinan dan keluarga karyawan pelaksana di daerah penelitian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pola konsumsi pangan keluarga karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana di PT. Adei Plantation & Industry Kebun Mandau.
- 2) Untuk mengetahui perbedaan pola konsumsi pangan antara keluarga karyawan pimpinan dan keluarga karyawan pelaksana di PT. Adei Plantation & Industry Kebun Mandau.
- 3) Untuk mengetahui persentase pengeluaran konsumsi pangan keluarga karyawan pimpinan dan keluarga karyawan pelaksana dari total pendapatan rumah tangga keluarga karyawan pimpinan dan keluarga karyawan pelaksana di PT. Adei Plantation & Industry Kebun Mandau.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah agar dapat dipergunakan sebagai:

- 1) Sumbangan dalam bentuk penelitian yang terkait dengan masalah tingkat konsumsi pangan pada karyawan perkebunan.
- 2) Sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai tingkat konsumsi pangan karyawan perkebunan.
- 3) Sebagai syarat dalam tri dharma perguruan tinggi dalam memenuhi persyaratan tugas akhir.